



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 796/XII/2013

I/DESEMBER 2013



PCWTO Hasilkan Sejumlah Kesepakatan



KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA DESEMBER 2013

Minggu pertama Desember ini, kegiatan Dewan ditandai dengan kegiatan rapat-rapat AKD untuk membahas masalah-masalah yang berkembang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Dan, kegiatan Ketua DPR RI dalam acara *launching* media center PT Askes sebagai BPJS Kesehatan serta dialog interaktif dengan tema "Tantangan Mengelola Peserta dari 16,4 juta jiwa menjadi 121,6 juta jiwa pada tahun 2014". Selain itu, terdapat pula agenda *Bali Session of the Parliamentary Conference on the WTO*.

Laporan AKD

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alié

Pengawasan DPR terhadap Pemerintah dilakukan secara aktif oleh Komisi-komisi DPR dan tim pengawasan. Timwas Century melakukan pengawasan, dan terakhir RDP dengan pakar hukum pidana dan pakar hukum tata negara. Agenda Rapat adalah meminta penjelasan mengenai implementasi pengambilan keputusan *bail out* Bank Century secara kolektif-kolegial dari perspektif hukum tata negara dan hukum pidana.

Rapat Kerja Komisi I dengan Menlu-RI, Menhan RI, Menkominfo, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg dan Mensesneg, pada akhir bulan November, berkaitan dengan penyadapan. Kesimpulan diberikan oleh Komisi I antara lain: bahwa perlu memberikan apresiasi terhadap sikap pemerintah RI yang keras dan tegas atas aksi penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi negara Indonesia. Komisi I meminta pemerintah untuk konsisten terhadap 6 langkah road map yang telah dirumuskan dengan memastikan posisi tawar dan capaian-capaian Indonesia. Komisi juga mendesak untuk melakukan percepatan penggunaan sistem persandian di semua lembaga negara dan kantor perwakilan RI di luar negeri, termasuk dalam mengamankan komunikasi bagi VVIP. Komisi menegaskan perlunya dilakukan penataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan telekomunikasi yang menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional Indonesia.

Komisi III sedang membahas Perppu No. 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Menjelang akhir penutupan sidang, hasil pembahasan akan dilaporkan oleh Komisi III di Sidang Paripurna. Dalam *point* menimbang, ditetapkannya Perppu



No. 1 tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain disebutkan bahwa: [a]. Berdasarkan pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara; [b]. Bahwa untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar, perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, terutama terhadap ketentuan mengenai syarat dan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi serta pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi. Dalam pembahasan, DPR dapat menerima atau menolak (menyetujui atau tidak menyetujui) atas Perppu tersebut. Apabila DPR tidak menerima Perppu tersebut, maka pada Rapat Paripurna yang sama, harus diputuskan (dalam bentuk RUU), yaitu RUU Pencabutan Perppu. Inisiatif atas RUU Pencabutan dapat dari DPR atau Pemerintah.

Rapat kerja Komisi III dengan Jaksa Agung Republik Indonesia. Dalam rapat kerja, anggota Komisi III menyoroti bahwa masih banyak kasus yang ditangani Kejaksaan yang belum terselesaikan. Diantaranya, adalah kasus penggelapan pajak oleh PT Wilmar International Limited Group. Pada bagian lain, rapat kerja juga membahas masalah RUU Kejaksaan RI. Jaksa Agung mengatakan bahwa pembahasan



daftar inventarisasi masalah atas RUU ini telah berlangsung 9 kali dan terakhir 20 November 2013. Namun demikian, Jaksa Agung menghendaki bahwa lebih baik Komisi III mendahulukan pembahasan atas RUU KUHAP, baru kemudian RUU Kejaksaan. Hal ini dikarenakan jika RUU Kejaksaan disahkan lebih dulu mendahului RUU KUHAP dikhawatirkan ada materi-materi dalam UU Kejaksaan yang dapat bertentangan dengan UU KUHAP. Pendapat ini juga didukung oleh Komisi III DPR RI. Ketua Komisi III menambahkan bahwa Kejagung harus terus menjalankan peran dan fungsinya untuk terlibat aktif dalam hal penegakan hukum dan memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejagung sepanjang tahun 2013. Profesionalisme di Kejagung telah mulai berjalan baik, walaupun ada kasus-kasus yang masih tertunda tetapi terus maju.

Ketua DPR pada Peresmian Media Center BPJS

Dalam sambutan singkatnya di peresmian Media Center BPJS, Selasa, 3 Desember 2013, Ketua DPR-RI mengatakan bahwa negara yang diwakili oleh sebuah Pemerintahan menjadi pihak yang mempunyai tanggungjawab penuh dalam melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, termasuk mengenai kesehatan. Kesejahteraan sosial merupakan bangunan awal dan mendasar di setiap negara yang menganut sistem apapun. Indonesia, melalui UUD 1945

telah mengatur pembentukan lembaga-lembaga yang secara khusus mengelola berbagai skema perlindungan sosial. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil dan merata, menjangkau seluruh rakyat. Salah satu upaya pembangunan bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan tersebut adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) mengenai hak terhadap jaminan sosial, dan Keputusan MPR-RI dalam TAP No. X/MPR/2001 yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Fungsi perundang-undangan telah diselesaikan oleh DPR dengan telah keluarnya UU BPJS sebagaimana permintaan UU SJSN.

Selanjutnya dalam rangka fungsi pengawasan, DPR akan mengawal dan memonitor lebih lanjut pelaksanaan dari kedua UU tersebut melalui berbagai peraturan tindak lanjut yang sudah dan akan segera disiapkan oleh Pemerintah. UU tidak ada artinya apabila tidak segera ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksanaan yang diamanahkan UU. Dalam sesi dialog interaktif, Ketua DPR mendesak bahwa tunggakan sebesar 1,8 triliun oleh Pemerintah dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) agar segera diselesaikan oleh Pemerintah melalui Kementerian

Kesehatan. Dengan demikian, tunggakan ini tidak akan mengganggu penyelenggaraan dan terutama keuangan PT Askes yang pada tanggal 1 Januari 2014 mendatang akan menjadi BPJS.

Diplomasi Parlemen

Sebagai bagian dari komitmen DPR RI terhadap pentingnya pilar aktivitas perdagangan internasional dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, DPR RI telah mengambil peran menjadi co-host dari kegiatan “Bali Session of the Parliamentary Conference on the WTO” yang berlangsung pada tanggal 2 dan 5 Desember 2013 di Bali – Indonesia. Keterlibatan parlemen dalam agenda WTO dan isu perdagangan bebas global bertujuan untuk memperkuat langkah WTO dalam mewujudkan perdagangan bebas global yang adil, bermanfaat dan berdasarkan tata aturan (*rules-based*), sehingga manfaat besarnya dapat dirasakan oleh berbagai bangsa di dunia.

DPR-RI berkeyakinan bahwa perdagangan internasional hanyalah merupakan alat dan cara untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang lebih asasi yang dimiliki oleh bangsa manapun, yakni perwujudan kesejahteraan rakyat, pencerdasan kehidupan bangsa, peningkatan marwah dan kedaulatan negara, serta penegakan ketertiban antar bangsa dan perdamaian dunia yang menyeluruh.**

PCWTO Hasilkan Sejumlah Kesepakatan

Parliamentary Conference on the WTO (PCWTO) yang diselenggarakan di Bali, tanggal 2 dan 5 Desember 2013 menghasilkan sejumlah kesepakatan penting.

Dalam Keterangan Pers, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Surahman Hidayat menyampaikan beberapa hal yang telah disepakati itu adalah menegaskan

komitmen untuk mendukung sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan adil berdasarkan prinsip non-diskriminasi.

Point ke dua yang disepakati adalah aktifitas perdagangan internasional memiliki peran penting sebagai salah satu alat untuk mendorong pembangunan. Selain itu, perlu ada keselarasan antara *Preferential Trade*

Agreements, termasuk diantaranya kerjasama perdagangan plurilateral, regional, dan bilateral, dengan sistem perdagangan multilateral.

Sidang ini juga mengharapkan adanya perkembangan dalam berbagai bidang, termasuk dalam negosiasi perdagangan untuk produk barang dan jasa lingkungan. Mendukung keterlibatan Negara berkembang



Delegasi Parlemen Indonesia (DPR RI) pada sidang PC WTO.

dalam proses negosiasi perdagangan bebas dan menyuarakan agar WTO dapat lebih mengakomodasi keterlibatan parlemen untuk meningkatkan transparansi dalam sistem perdagangan internasional.

Surahman menambahkan, Indonesia juga memberikan beberapa masukan amandemen terhadap *Outcome Document*, yaitu menekankan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari mekanisme perdagangan multilateral.

Hasil kesepakatan Doha *Development Agenda* harus seimbang dan lebih adil bagi kelompok negara berkembang dan kurang berkembang, serta mendorong partisipasi negara berkembang untuk meneruskan agenda pembangunan pasca 2015.

Surahman menambahkan, delegasi DPR RI menyampaikan beberapa hal penting diantaranya adalah WTO perlu mempertimbangkan aspek ketahanan

pangan dan implikasi perdagangan bebas terhadap para petani tradisional.

Secara khusus, DPR RI juga menyampaikan bahwa WTO seharusnya mengeliminasi berbagai kampanye negatif terhadap komoditi minyak sawit dan produk turunannya serta membuka akses pasar bagi produk sawit di negara-negara maju, terutama karena tanaman sawit di Indonesia diproduksi secara tradisional dan menyerap lapangan kerja dalam jumlah besar.

Intinya, kata Surahman, kita harus memastikan bahwa ketentuan WTO diimplementasikan sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kompetisi dan rivalitas yang timbul dari mekanisme perdagangan bebas harus dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

WTO, kata Surahman, seharusnya dapat dipandang bukan saja sebagai forum antar pemerintah, tetapi lebih melibatkan parlemen. Dalam be-

berapa kasus, pihak parlemen justru tersingkir dari proses negosiasi. Pada dasarnya hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Untuk itu, diperlukan dukungan yang lebih baik dalam hal finansial maupun ketersediaan informasi untuk meningkatkan keterlibatan parlemen dalam proses pengambilan keputusan. Peran parlemen bukan hanya dalam proses *diplomacy accountability*, tetapi juga harus bisa memberikan solusi.

Sementara anggota BKSAP Nurhayati Ali Assegaf yang juga menjabat sebagai anggota *Executive Committee Inter-Parliamentary Union (IPU)* mengatakan, Indonesia akan mengajukan diri untuk menjadi anggota *Steering Committee PCWTO* pada tahun 2014, bersamaan dengan rotasi anggota *Steering Committee*.

DPR berpandangan, perdagangan internasional dalam kerangka multilateral memang diperlukan, sepanjang komoditas yang diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan negara yang bersangkutan.

Selain kerangka kerjasama multilateral, DPR RI masih memandang perlunya kerjasama bilateral, regional dan plurilateral untuk terus dikembangkan.

Dalam prakteknya, kata Nurhayati, kerjasama perdagangan non-multilateral dapat lebih fleksibel dan memberikan ruang bagi negara-negara berkembang untuk menyuarakan kepentingannya. Selain itu perdagangan internasional tentu harus dilakukan dengan tetap mengutamakan prinsip *open and fair trade* dan *mutual respect*.

(tt) foto:ry/parle

Perdagangan Bebas Tidak Boleh Ganggu Ketahanan Ekonomi Nasional

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengingatkan agar upaya mewujudkan perdagangan bebas tidak sampai mengganggu ketahanan ekonomi nasional suatu negara. Inilah yang mendorong anggota parlemen berkumpul pada saat pelaksanaan sidang WTO untuk mengkritisi dan memastikan perdagangan bebas berjalan secara adil dan bermanfaat.

"Tantangan inilah yang menjadi kepedulian kita sebagai penerima mandat dari rakyat mengawal pembangunan nasional dari potensi dampak negatif kerjasama perdagangan

bebas yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional masing-masing negara. Penting menjaga perdagangan bebas diatas ketahanan ekonomi nasional suatu bangsa," katanya saat bicara dalam acara pembukaan *Parliamentary Conference on the WTO (PC WTO)* di Denpasar, Bali, Senin (2/12/13).

Dihadapan peserta sidang yang terdiri dari 162 negara anggota IPU (*Inter-Parliamentary Union*) dan *European Parliament* ia menekankan peran parlemen dalam isu perdangan bebas dunia tidak hanya mendorong terwujudnya kerja sama



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat berpidato pada pembukaan PC WTO

internasional dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi diantara bangsa-bangsa namun lebih dari itu parlemen adalah miniatur rakyat yang menentukan sendiri eksistensi dan corak kerja sama ekonomi lainnya yang diinginkan.

Ketua DPR juga berharap anggota parlemen yang hadir dalam pertemuan PC WTO dapat mendukung penguatan sistem perdagangan multi lateral dan upaya penyelesaian Doha Development Agenda termasuk isu utama Bali Package.

Sementara itu anggota Komite Eksekutif IPU Phairoj Thambanjong yang bicara mewakili Ketua IPU mengucapkan terima kasih atas dukungan DPR RI sehingga PC WTO dapat berlangsung di Bali. "Saya mengucapkan terima kasih kepada parlemen Indonesia DPR RI yang telah meluangkan waktu dalam menyiapkan acara ini dengan sebaik mungkin," ujarnya.

Ia menekankan kehadiran parlemen adalah untuk memastikan WTO bisa mengatasi hambatan yang dihadapi negara berkembang dalam mengakses pasar negara industri. Parlemen yang tergabung dalam PC WTO juga mendukung negara berkembang untuk mendapat dorongan melalui adanya perlakuan khusus, fasilitas perdagangan dan bantuan untuk perdagangan. (iky) foto:ry/parle

Orientasi Kesehatan Bergeser Akibat Pengaruh Neoliberalisme

Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjip-taning menyatakan bahwa saat ini orientasi kesehatan sudah bergeser dari sosial menjadi komersial. Hal tersebut akibat pengaruh kapitalisme dan neoliberalisme.

"Tadinya kesehatan orientasinya sosial, tetapi karena pengaruh kapitalisme dan neoliberalisme sudah bergeser menjadi komersial. Itu yang harus kita urai sebetulnya," tegas Ribka saat Rapat Dengar Pendapat dengan Wakil Menteri Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial, LPSK dan KKI, di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (4/12)

Sehingga dokter, kata Ribka, mau tidak mau berhubungan dengan industri farmasi, teknologi kesehatan yang demikian mahal. Seorang dokter dipaksakan untuk mau tidak mau nilai pengabdianya mulai bergeser.

"Dokter mau tidak mau, sudah tidak jujur dengan sumpah dokternya," imbuhnya.

Rapat yang membahas mengenai proses hukum dugaan malpraktek di RSUD Prof. Dr. R.D. Kandou Manado. Ribka mengatakan bahwa terkait



Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjip-taning saat Rapat Dengar Pendapat dengan Menkes.

kasus yang menimpa dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, semua ini karena kesalahan sistem yang ada di Indonesia.

Ribka mengakui, bahwa demonstrasi itu dijamin oleh Undang-undang dan solidaritas kepada teman pun itu boleh saja, apalagi dokter sangat tinggi feodalismenya. Dimana menganggap teman sejawat itu seperti saudara kandung, tinggi sekali. Walaupun teman sejawatnya sudah tidak seperti itu, sudah

tidak seperti saudara kandung lagi saat ini.

"Saya pernah membawa anak saya ke satu rumah sakit, pas Idul Adha, karena hari ini hari libur konsulinnya dobel ya. Sepertinya tidak ada itu di sumpah dokter," cerita Ribka.

Jadi, ujar Ribka, saat ini tidak juga teman sejawat itu menganggap sebagai saudara kandung. Sudah luntur ideal-

isme dokter. Hanya beberapa persen yang masih taat dengan sumpah dokternya.

Ribka menjelaskan, bahwa kejadian ini sebagai hal yang harus disikapi bersama. Disisi lain, pasien juga memang harus mendapat perlindungan.

Ribka menceritakan, bahwa dirinya pernah disomasi IDI atas pernyataannya, bahwa dokter lebih jahat dari polisi, karena polisi menilang orang sehat, dokter menilang orang sakit. Sebetulnya, kata Ribka, itu pernyataan seorang pasiennya.

Menurut Ribka, hal ini berbeda sekali saat masih di bangku kuliah. Dirinya ingat betul kata-kata dosennya, dr. Sinaga yang menyatakan keilmuan kita, kepintaran kita itu dari Tuhan dan

dari dosen kita bisa dipakai.

Ketika ada pasien panas sudah empat hari lidah kotor, ungkapinya, kita bisa bilang *working* diagnosa, diagnosa kita kerja, dan observasi. “Ibu di rumah anaknya dikasih diet lunak ya. Dokter sekarang tidak. Lab ya bu,” papar Ribka.

Dokter sekarang tidak percaya lagi dengan keilmuan dan kepintarannya dari Tuhan. Mereka lebih mempercayakan kepada alat teknologi yang canggih. Mungkin, papar Ribka, karena dari Lab, dokter mendapatkan prosentase 15%.

Menurut Ribka, teknologi itu menjanjikan. Kapitalisme dan neoliberalisme sudah masuk di bidang kesehatan. Dokter sudah tidak mau tahu lagi pasien itu terbebani beratnya biaya

yang harus dikeluarkan.

“Belum lagi kalau hasil labnya tidak jelas, diulang lagi ya bu. Itu kan bukan kesalahan pasien,” keluh Ribka.

Untuk kasus ini, sebetulnya, ungkap Ribka, yang harus juga dipanggil adalah Persi, Arsada, dan Manajemen Rumah Sakit. Jangan akhirnya yang terdiskriminasi adalah dokter.

Dirinya ingat betul kata-kata dari dokter orangtuanya yang mengatakan, kalau mau jadi dokter jangan jadi pedagang, dan kalau mau jadi pedagang jangan jadi dokter.

“Tidak nyambung antara sosial dengan mencari uang, dokter terbebani itu. Apalagikalau RSUD dijadikan PAD,” tegas Ribka. (sc)/foto:odjie/parle.

Sembilan Nama Terpilih Menjadi Anggota KPAI Periode 2013-2016

Setelah melewati proses *fit and proper test* selama tiga hari belakangan, akhirnya Kamis (5/12) Komisi VIII DPR RI telah memilih dan mengesahkan sembilan nama yang akan menjadi anggota KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Periode 2013-2016.

“Alhamdulillah, setelah tiga hari kami menggelar *fit and proper test* kandidat anggota KPAI Periode 2013-2016, hari ini kami berhasil memilih dan mengesahkan Sembilan dari delapan belas nama yang diajukan presiden untuk menjadi calon anggota KPAI. Ke sembilan nama terpilih itu tiga diantaranya *incumbent*, dan enam nama lainnya tokoh baru yang memiliki komitmen dan kapabilitas yang tinggi terkait perlindungan terhadap anak,” jelas Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah.

Ida mengatakan bahwa pemilihan tersebut sebenarnya tidak melihat latar belakang apakah ia *incumbent* atau tidak. Namun murni berdasarkan komitmen dan kapabilitas yang tinggi untuk memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. Selain itu memiliki visi dan misi untuk memaksimalkan kinerja KPAI sebagai lembaga Negara yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia.

Meski demikian, diakui Ida, kandidat *incumbent* juga diperlukan untuk memberikan keberlangsungan atau kesinambungan antara program-program yang sudah ada sebelumnya dengan program-program yang akan dijalankan di periode mendatang.

“Sesuai dengan Undang-undang dimana anggota KPAI



Pimpinan Komisi VIII DPR RI.

harus terdiri dari berbagai unsur, baik itu pemerintah, LSM (lembaga swadaya masyarakat), tokoh agama, wakil dari kalangan Profesi, dunia usaha, organisasi sosial dan kelompok masyarakat peduli anak. Sementara itu tidak ada dalam undang-undang tentang komposisi gender dari anggota KPAI. Kebetulan saja kandidat yang diajukan lebih didominasi kaum hawa,” ungkap politisi dari Fraksi PKB ini.

Kesembilan nama yang terpilih menjadi anggota KPAI Periode 2013-2016 itu adalah Maria Ulfa Anshor, Ashrorun Ni’am Sholeh, Maria Advianti, Rita Pranawati, Susanto, Budiharjo, Putu Elvina, Erlinda dan Titi Haryati. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle.

Eva: TNI Mestinya Bisa Disidik KPK

Wacana untuk menyidik anggota TNI yang terlibat tindak pidana korupsi oleh KPK, tampaknya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Selama ini tindak pidana umum termasuk pidana korupsi yang dilakukan anggota TNI masuk ke peradilan militer. Perlu ada perubahan soal ini.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari (F-PDI Perjuangan) di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin(2/12). “Tidak bisa anggota TNI disidik KPK karena ada UU Peradilan Militer dimana pidana umum termasuk korupsi, harus dilaksanakan di peradilan militer. Yang kita paham bahwa sangat tidak akuntabel dan sangat tidak sesuai dengan *integrated criminal justice system* kita,” tandas Eva.

Harus dimunculkan keadilan antara warga negara sipil dan militer. Untuk tindak pidana korupsi, mestinya KPK juga bisa masuk ke lingkungan institusi TNI. “Saya berharap itu diakhiri, karena tidak *fair*. Sesama warga negara, kok, kenapa harus ada sistem hukum yang berbeda,” tandas Eva, penuh tanda tanya.

Untuk melakukan kontrol saja, KPK tidak bisa masuk. Padahal, pengadaan alutsista ditubuh TNI begitu besar. Peluang korupsi begitu besar terjadi. “Semua korupsi yang ada di TNI tidak ada yang mengadili, walau pun kita ramai mempermasalahkan *mark up* dan seterusnya. Semuanya berjalan aman-aman saja di sana.”



Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari.

Luput dari pengawasan KPK, justru institusi TNI dikhawatirkan akan menjadi tempat sembunyi yang aman untuk para pelaku korupsi. “Saya melihat 2 sistem peradilan ini menjadi tempat sembunyi ketidak akuntabilitasan dan melukai prinsip *equality before the law*,” tambah Eva lagi.

Solusinya, lanjut Eva, KPK harus bicara dengan menteri pertahanan, karena keputusan politiknya ada di Menhan. Superioritas TNI harus diakhiri. Kesan yang mungkin ditangkap publik adalah TNI boleh melakukan kejahatan-kejahatan umum, tetapi tidak boleh diproses di pengadilan umum. (mh), foto : naefuroji/parle/hr

GKSB DPR Desak Pemerintah Tingkatkan Kontribusi Untuk UNRWA

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) BKSAP DPR untuk Palestina Al Muzammil Yusuf.

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) BKSAP DPR untuk Palestina Al Muzammil Yusuf, Kamis, (28/11) di Gedung DPR menerima *Chief of Donor Relation Esther Kuisch-Laroche*, dan *Senior External Relation and Project Officer Osamu Tanaka*, perwakilan dari *United Nations Relief and Works Agency (UNRWA)*.

Kunjungannya ke DPR dimaksudkan untuk mempererat kerjasama parlemen dan kementerian luar negeri. Selama dua hari di Jakarta, mereka mengadakan diskusi dengan berbagai

pihak mengenai kondisi terbaru para pengungsi di Suriah. Ratusan ribu orang tergolong sebagai *Internally Displaced People (IDP)* akibat konflik, termasuk sekitar 23 ribu orang di Gaza. Hal tersebut juga mempengaruhi para pengungsi Palestina. Perwakilan UNRWA berkedudukan di Jerusalem untuk dapat lebih memahami kondisi terkini di Timur Tengah.

Menurut keduanya, para pengungsi Suriah membutuhkan banyak bantuan, termasuk selimut, pakaian, dan makanan. Kondisi *camp* pengungsian

sangat memprihatinkan karena sudah kelebihan kuota yang diperparah dengan kondisi kemiskinan. Enam ribu orang diperkirakan sudah eksodus ke Mesir. Bahkan sudah ada arus pengungsi kewilayah Eropa. Ada kapal pengungsi yang tenggelam dalam perjalanan ke Eropa.

Selain itu, sambung perwakilan UNRWA, di Gaza, harga barang termasuk makanan dan bahan bakar meroket, tidak ada lagi arus impor-ekspor barang termasuk keperluan konstruksi. Sarana pengolahan limbah



di Gaza juga sudah berhenti bekerja, menjadikan kondisinya semakin memprihatinkan. Ketegangan diperparah dengan angka pengangguran yang semakin tinggi dan tekanan dari pihak Israel. Di *West Bank*, ekspansi Israel terus berlanjut.

UNRWA mendapat dana bantuan 1 milyar USD untuk menangani 5 juta pengungsi. Tujuan UNRWA adalah menyediakan lapangan kerja bagi warga Palestina agar dapat mandiri, diantaranya adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah. Banyak anak-anak yang lahir di *camp* pengungsian dan tidak dapat mengenal tanah kelahiran mereka. UNRWA kekurangan dana 36 juta USD untuk membiayai gaji para dokter, perawat, dan guru sekolah. Apabila tidak ada dana untuk menggaji mereka, maka kondisi pengungsian akan semakin parah. Indonesia telah memberikan bantuan sejumlah 100 ribu USD. UNRWA berharap agar Indonesia dapat meningkatkan dana bantuannya.

UNRWA bermaksud untuk menggalang dukungan Parlemen sebelum bertemu dengan pihak eksekutif. Dengan waktu kunjungan yang sangat sempit, kemungkinan akan sulit bagi UNRWA untuk memperoleh dukungan yang diperlukan. Kondisi sekarang ini adalah salah satu yang terparah sejak 1948. Pada 1948 dan 1967, warga Palestina terpaksa meninggalkan negerinya.

Sekarang ini, generasi baru terlahir sebagai pengungsi, sehingga akan sulit bagi generasi mendatang untuk membangun kembali negaranya. Para pengungsi Palestina yang pada mulanya berada di Syria, kini juga harus meninggalkan negaranya akibat konflik. Mereka meninggalkan harta benda, barang berharga, dan pekerjaan mereka di tanah Palestina yang sekarang diduduki Israel. Situasi saat ini sangat kompleks. Bukan hanya konflik Israel-Palestina dan kondisi politik di Suriah, tetapi saat ini persoalan pengungsi juga harus menjadi perhatian utama.

Beberapa waktu lalu, DPR RI sudah melakukan kunjungan kerja ke daerah konflik, termasuk Gaza. Namun melihat perkembangan situasi terbaru di Mesir saat ini, akan sangat sulit untuk melakukan kunjungan dan mempelajari kondisi yang ada secara langsung. UNRWA berharap agar perwakilan DPR RI dapat menyampaikan hasil diskusi ini kepada komisi terkait. DPR RI sendiri telah berperan secara signifikan dalam mendorong pemerintah RI untuk memberikan dana bantuan kepada Palestina.

Menanggapi hal itu Muzammil menegaskan, GKS DPR RI untuk Palestina akan terus mendorong Pemerintah Indonesia agar memberikan kontribusi lebih kepada badan-badan PBB yang bekerja secara langsung untuk menyelesaikan isu Palestina. GKS DPR RI juga akan melakukan komunikasi secara berkala dengan UNRWA untuk mendapatkan berita terkini mengenai situasi perkembangan pengungsi rakyat Palestina. (mp,aw), foto : ibnur k/parle/hr.

Jangan Ada Korban Perguruan Tak Terakreditasi



Anggota Komisi X DPR Popong Otje Djundjuna berjabat tangan dengan jajaran BAN PT

Anggota Komisi X DPR Popong Otje Djundjuna menegaskan tidak boleh ada lagi anak didik yang menjadi korban

Perguruan Tinggi (PT) yang tidak terakreditasi. Akibat dari tidak terakreditasinya PT ini diantaranya menjadikan

lulusan sulit untuk mencari pekerjaan.

“Sebagaimana kita tahu, sekarang ini masyarakat begitu antusias mendirikan Perguruan Tinggi (PT) swasta, bak jamur di musim hujan. Jika kita menilik Undang-undang Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 28, akibat banyaknya PT tidak terakreditasi ini sampai terpaksa ada korban, dan itu tidak sedikit. Hal ini karena belum terakreditasi, atau akreditasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan,” sesal Popong saat RDP dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), di Gedung Nusantara I, Senin (2/10).

Politisi Golkar ini menyatakan, jika memang belum terakreditasi, ijazahnya bisa dibatalkan. Ia menyayangkan BAN PT yang menyatakan bahwa anggaran menjadi kendala dalam proses akreditasi.

“Jangan sampai anggaran itu akhirnya menjadi penyebab utama proses

pengakreditasi menjadi terhambat. Jangan sampai ada lagi kekurangan dana yang menyebabkan kerugian kepada anak didik. Tugas paling berat BAN PT itu bukan mengakreditasi, justru tugas filosofinya yang berat, yaitu meningkatkan kualitas perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta. Bagaimana supaya bisa meningkat menjadi PT yang berkualitas,” jelas politisi asal Jawa Barat ini.

Pada paparan yang disampaikan oleh Ketua BAN PT Mansyur Ramly, di tahun 2013, BAN PT telah menerima berkas pengajuan akreditasi sebanyak 6.664 berkas, kemudian telah melakukan proses akreditasi sebanyak 3.200 berkas, sisa sebanyak 3.464 berkas akan diproses pada tahun berikutnya. Sedangkan perkembangan akreditasi program studi yang sudah diputuskan statusnya oleh BAN PT sebanyak 2.229 program studi dari jumlah 3.230 program studi.

Melihat hal ini, Popong menilai kinerja BAN PT sebenarnya sudah baik. “Namun, kalau kinerja sudah baik. Saya

menghargai langkah-langkah yang diambil BAN PT. Dalam kondisi seperti ini, toh jajaran BAN PT tetap melakukan program dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, terimalah penghargaan dari saya,” puji Popong.

Terkait dengan rencana pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) oleh BAN PT, Popong menilai hal ini merupakan suatu rencana yang positif.

“LAM akan menjadi mitra kerja BAN PT, sehingga pekerjaan BAN PT tidak menjadi berat nantinya. Saya sangat mendukung didirikannya LAM, namun dengan catatan tolong nanti supaya koordinasinya jangan sampai tumpang tindih antar kedua instansi ini,” ujar Popong.

Senada dengan Popong, Anggota Komisi X Dedi S Gumelar juga setuju dengan pembentukan LAM.

“Saya pribadi menyetujui jika LAM menjadi badan sendiri. LAM ini harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Selain itu, BAN PT juga harus menjadi pe-

ngawas yang baik untuk LAM. Jangan sampai LAM ini menjadi kepentingan organisasi di luar atau organisasi yang mempunyai akses politik,” ujar Politisi PDI Perjuangan ini.

Namun, ia juga memberi catatan, LAM harus mendapat perhatian yang serius juga. Selain LAM bertugas mengakreditasi program studi, LAM juga perlu memiliki akreditasi sendiri.

“Yang paling penting, juga perlu akreditasi terhadap LAM itu sendiri, maka ia harus memiliki semacam ISO sendiri,” pesan Dedi.

Dalam kesimpulan RDP, Komisi X mendorong agar BAN PT agar segera menyelesaikan akreditasi yang masih tersisa dengan dukungan anggaran yang memadai. Selain itu, Komisi X juga mendorong agar BAN PT melakukan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan amanat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (sf)/foto:odjie/parle/iv.

DPR Setujui Penggunaan BMN Sebagai Underlying Aset Penerbitan SBSN



Ketua Komisi XI DPR Oilly Dondokambey berdialog dengan Menkeu.

Komisi XI DPR menyetujui usulan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai aset jaminan (*underlying asset*) untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk 2014. Usulan ini disampaikan Menteri Keuangan Chatib Basri beserta jajarannya, Selasa (3/12) sore.

“Kami menyetujui permintaan pemerintah atas besaran ‘*underlying*’ senilai Rp 19,46 triliun,” kata Ketua Komisi XI DPR Oilly Dondokambey saat memimpin rapat kerja di Ru-

ang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I.

Dalam paparannya, Chatib menjelaskan BMN yang diusulkan merupakan aset yang berada di 30 Kementerian dan Lembaga yang berjumlah 1.050 unit yang terdiri atas tanah dan bangunan dengan nilai Rp 19,461 triliun. Selain tanah dan bangunan ini, sukuk negara juga memiliki jaminan lain seperti proyek infrastruktur.

“Kami meminta persetujuan DPR untuk menggunakan Rp 19,461 triliun dari total aset BMN sebagai aset SBSN yang akan diterbitkan 2014,” papar Chatib.

Dalam sesi pendalaman, Anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid berpendapat pemerintah seharusnya mengasuransikan BMN yang akan diunakan sebagai aset SBSN guna mengantisi hal yang tidak diinginkan. Selain itu, Politisi Golkar ini juga menginginkan supaya penggunaan pinjaman dari sukuk negara berdasarkan asas syariah sehingga sesuai peruntukannya.

“Jadi kalau uang dari sukuk ini dipergunakan tidak secara syariah, untuk apa diterbitkan sukuk? Lebih baik menerbitkan obligasi biasa saja,” tegasnya.

Namun, Chatib menyatakan upaya untuk memberikan asuransi terhadap keseluruhan aset belum memungkinkan karena pemerintah tidak memiliki kapasitas fiskal memadai serta belum memiliki pencatatan terkait aset yang menjadi prioritas.

“Untuk melakukan asuransi, nanti ada implikasi anggaran. Saat ini, kita harus melihat kepentingannya karena sulit kalau dilakukan secara tiba-tiba, apalagi harus ada proses indentifikasi aset terlebih dahulu,” jawab Mantan Kepala BKPM. (sf)/foto:odjie/parle/iw.

RUU Kepalangmerahan Segera Diselesaikan



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima relawan PMI.

Para relawan Palang Merah Indonesia dari berbagai daerah mendatangi gedung DPR RI untuk menuntut RUU Kepalangmerahan segera disahkan menjadi UU. Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima para relawan, menandatangani, segera memanggil Pimpinan Pansus RUU ini agar segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan.

Kehadiran Marzuki disambut antusias para relawan PMI di ruang Bamus DPR, Selasa (3/12). RUU Kepalangmerahan merupakan usulan inisiatif DPR dan sempat mengendap selama 13 tahun. Saatnya RUU ini mendapat perhatian, karena masalah substan-

sinya yang dulu masih mengganjal sudah tidak ada lagi. Persoalan yang mengganjal itu salah satunya adalah lambang palang merah yang sempat menjadi perdebatan.

“Kalau tidak bisa menyelesaikan RUU ini, Pimpinan Pansusnya kita roling saja,” tegas Ketua DPR yang disambut tepuk tangan antusias para relawan. Mengingat DPR adalah lembaga politik, kata Marzuki, jadi kepentingan politik pun begitu kental terasa. Namun, masyarakat tidak boleh tersandra oleh kepentingan politik dalam membahas RUU ini.

RUU Kepalangmerahan ini nantinya

akan memberi perlindungan hukum yang jelas bagi para relawan. Seperti diketahui, para relawan bekerja dengan naluri kemanusiaan. Mereka tidak saja membawa misi kemanusiaan ke lokasi bencana alam, tapi juga ke lokasi konflik, bahkan perang. Mereka bekerja dari pra hingga pascabencana atau konflik.

H.M. Muas Ketua PMI Bidang Relawan yang memimpin delegasi ini, menjelaskan, kewajiban para relawan sudah ditunaikan di tengah masyarakat. Saatnya para relawan juga menuntut haknya untuk meminta perlindungan hukum dengan segera mengesahkan RUU Kepalangmerahan. Sebagai negara yang menandatangani Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan kemanusiaan, mestinya Indonesia sudah punya UU kepalangmerahan.

Dari 198 negara di dunia, hanya Indonesia yang belum memiliki UU kepalangmerahan ini. Padahal, masih menurut Muas, PMI punya sejarah panjang di Republik ini. Sejak perang kemerdekaan, PMI sudah ikut berperan menggalang misi kemanusiaan. Dan kedatangan para relawan ke DPR ini, bertepatan pula dengan momen hari relawan 5 Desember dan pada 25 Desember menjadi hari relawan PMI.

(mh)/foto:iwan armanias/parle.

Lima Piala Untuk Setjen DPR RI

Sekretaris Jenderal DPR RI Wiantuningtyastiti mengungkapkan rasa bangga atas keberhasilan tiga kontingen karyawan Setjen DPR dalam mengikuti kejuaraan olah raga tingkat nasional. Kemenangan itu menurutnya sebagai bukti semangat korps yang

kuat di kesetjenan.

“Luar biasa, ini membanggakan sekali bisa mengalahkan kementerian dan lembaga lain. Lomba gerak jalan ada 2 regu, dua-duanya bisa menang. Saya tentu bangga dan mengucapkan

terima kasih itu adalah wujud dari rasa korps yang sangat kuat di Setjen DPR,” katanya usai memimpin upacara dalam rangka HUT Korpri ke-42 di halaman Gedung Setjen, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/13).



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti didampingi Wasekjen DPR RI Achmad Djuned saat memberikan piala Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional.

Ada 3 kompetisi yang diikuti oleh kontingen Setjen DPR, yaitu Gerak Jalan Proklamasi yang diselenggara-

kan oleh Kemenpora. Dua Regu yang berpartisipasi berhasil merebut juara I dan II. Selanjutnya Tim Futsal berhasil

meraih juara II untuk kedua kalinya dalam kejuaraan antar Kementerian/Lembaga di Manado, Sulut. Prestasi terakhir diraih dalam Lomba Gerak Jalan Tradisional Bogor-Jakarta sejauh 60 km dalam rangka Hari Pahlawan dan HUT Korps Marinir. Kontingen berhasil merebut juara II beregu dan juara I perorangan.

5 Piala yang berhasil diperoleh secara resmi diserahkan oleh perwakilan kontingen kepada Sekjen DPR dalam rangkaian upacara menyambut HUT Korpri. Keberhasilan ini mendapat apresiasi oleh seluruh peserta upacara.

Komandan Regu gerak jalan Ahmadi mengatakan perjuangan timnya untuk merebut trofi cukup berat. "Saingan yang kuat itu dari kontingan dari Sulawesi juga dari PNS Kepolisian dan TNI serta Taruna Akademi Maritim. Kita bersyukur bisa menunjukkan kemampuan terbaik," pungkas dia. (aw/iky) foto:wahyu/parle

Komisi V : Persiapkan Pintu Masuk Pulau Komodo

Komisi V DPR RI mengunjungi Kabupaten Manggarai Barat, mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, dengan melihat Manggarai barat teristimewa, Labuhan Bajo dengan Pulau Komodo dimana salah satu menjadi tujuh keajaiban atau *seven wonder of the world*. Meninjau pelaksanaan pengembangan Bandara Komodo dan pelaksanaan proyek jalan strategis nasional.

Dikatakan Anggota Komisi V Eriko Sotarduga B.P. Sitorus (F-PDIP), kita berikan kesempatan bagi masyarakat luar baik itu dalam negeri atau luar negeri yang ingin datang ke Manggarai Barat teristimewa ke pulau Komodo. ini menjadi tugas kita bersama untuk memberikan yang terbaik bagi Manggarai Barat khususnya, maupun NTT umumnya.

"Percepatan pembangunan infrastruktur Kabupaten Manggarai Barat membuka pintu masuk Pulau Komodo, Karena pada dasarnya Indonesia memiliki alam yang indah begitu juga flora dan faunanya ini yang harus kita



Anggota Komisi V DPR Eriko Sotarduga B.P. Sitorus.

kembangkan" kata Eriko, saat mengikuti kunjungan spesifik, Komisi V.

Dimana tadi telah disampaikan oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dulla bahwa, ada salah satu pantai yang unik pantai Pink atau Merah. Dikatakan Eriko, tugas kami salah satunya sebagai komisi infrastruktur tentunya memberikan yang terbaik bagi Manggarai Barat masyarakat maupun juga teristimewa NTT teristimewa karena pulau komodo menjadi tujuh

keajaiban dunia.

Tidak ada jalan lain, prinsip dasar yang paling utama untuk meningkatkan adalah kaitan dengan perekonomian yaitu tidak ada jalan lain adalah membangun infrastruktur. Sebagai contohnya depresi besar tahun 20 di dunia yang terjadi pada Amerika ialah membangun infrastruktur. Di Masa sulit di dunia pada masa ini pilihan Satu-satu jalan untuk mengembalikan hal ini dengan membangun infrastruktur akan memulihkan sedikit demi sedikit dari dalam. Hingga masyarakat dari dalam bergerak dan berpartisipasi untuk membangun membaktikan dirinya, membuktikan dirinya bahwa dia bisa mengisi dan berpartisipasi dalam pembangunan ini.

NTT adalah relatif lebih tinggi tingkat kemiskinannya, dan masyarakat NTT adalah masyarakat yang mempunyai harga diri, katanya, kami melihat itu dan kami ingin memberikan kesempatan. "Kami tidak memberikan ikannya tapi kami memberikan kailnya, selanjutnya masyarakat NTT yang akan melakukan

finishing untuk membuat ini menjadi akhir yang lebih baik,” tegasnya.

Eriko menjelaskan bahwa Komisi V sudah memberikan persetujuan perpanjangan landasan penerbangan Bandara dan pembangunan infrastruktur lainnya sehingga diharapkan di awal 2015 bisa digunakan. “Bisa penerbang langsung dari Jakarta dan Bali bisa langsung dari sini, Singapore, Malaysia, Australia dan penerbangan luar negeri bisa langsung dari sini yang penerbangannya 4-5 jam dan negara-negara Asean yang berdekatan selama ini. Pesawat Sekelas 737 dan airbus

bisa langsung masuk kesini sehingga menjadi pintu masuk pariwisata disini,” bingganya.

Salah satu unggulan Kabupaten Manggarai adalah pariwisata dan itu multiplier effectnya luar biasa menjadi besar karena semua bisa berpartisipasi. Hanya memang Rencana Tata Ruang dan wilayah harus jelas supaya jangan sampai alam ini berubah terlalu drastis.

Terkait, pelaksanaan pembangunan jalan strategis nasional masih terkendala tumpang tindih dengan hutan lindung. Komisi V harus membahasnya

lebih lanjut dan nanti akan dibicarakan dengan komisi IV yang membidangi kehutanan seperti apa efeknya.

Karena kita tidak mungkin mengorbankan alam yang baik, supaya ada keseimbangan bisa dicari jalan keluarnya. Menurutnya, bisa dengan jalan yg pantai atau coastal road itu yang diperbesar. “Tidak perlu ada yang dikhawatirkan apabila tidak berdampak tidakterlalu baik akan di cari jalan terbaiknya dan akan ada analisa dampak lingkungannya,” kata Eriko Sotarduga B.P. Sitorus (FPDIP) asal Pemilihan DKI Jakarta II. (as)/Foto:Agung/Parle

Tidak Seorangpun Boleh Dihilangkan Secara Paksa



Anggota Komisi I DPR Achmad Daeng Sere.

Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere (F-PPP) mengatakan bahwa tidak satupun alasan, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, maupun situasi politik dalam negeri yang tidak stabil atau situasi darurat lain, yang dapat diterima sebagai suatu pembenaran atas penghilangan paksa.

“Tidak seorangpun yang boleh dihilangkan secara paksa,” tegas Achmad Daeng Sere, usai mengikuti Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri, yang mengagendakan pembahasan RUU tentang Pengesahan *International Convention for The Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa), Rabu (4/12), di

Gedung DPR RI.

Achmad Daeng Sere menjelaskan penghilangan paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan, atau bentuk perampasan kebebasan lain yang dilakukan oleh aparat negara, atau oleh orang atau kelompok orang yang bertindak dengan kewenangan, dukungan, atau persetujuan dari negara, dengan disertai penyangkalan untuk mengakui adanya perampasan kebebasan atau penyembunyian nasib atau keberadaan orang yang hilang, sehingga penempatan orang-orang tersebut di luar perlindungan hukum.

“Betapa seriusnya penghilangan paksa yang merupakan suatu tindak kejahatan, dan dalam situasi tertentu didefinisikan dalam hukum internasional sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” ungkap Daeng Sere.

Patut diketahui, Konservasi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 2006, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 27 September 2010 di New York, dan Presiden RI telah memberikan izin prakasa kepada Menlu RI untuk melaksanakan proses ratifikasi Konvensi tersebut.

Konvensi ini ditetapkan untuk mencegah penghilangan paksa dan

melawan segala bentuk impunitas atas kejahatan penghilangan paksa. Konvensi ini antara lain mengatur hak-hak setiap orang untuk bebas dari penghilangan paksa, hak para korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan, serta untuk mengetahui kebenaran kasus penghilangan paksa dan nasib orang-orang yang dihilangkan, dan hak atas kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi untuk tujuan ini.

Ada empat jenis hak-hak mendasar yang dilanggar oleh kejahatan penghilangan paksa, yaitu hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan dan keamanan, hak untuk diperlakukan sama didepan hukum, dan hak untuk hidup.

Konvensi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kembali kasus penghilangan paksa. Hal tersebut dikarenakan setiap Negara Pihak harus menyelidiki praktik penghilangan paksa yang dilakukan oleh orang-orang atau sekelompok orang serta membawanya ke Pengadilan.

“Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada prinsipnya sangat setuju dan segera untuk ditindaklanjuti pembahasan RUU ini,” kata Achmad Daeng Sere, Anggota Komisi I dari Fraksi PPP, asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. (as)/Foto:Wy/Parle.



Komisi IV Konfirmasi 8 Perusahaan Terkait Kebakaran Hutan Provinsi Riau



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo.

Komisi IV mengundang 8 perusahaan yaitu PT. Laggam Inti Hiberida, PT. Bumi Reksa Sejati, PT. Tunggal Mitra Plantation, PT. Udaya Loh Dinawi, PT. Jatim Jaya Perkasa, PT. Multi Gambut Industri, PT. Mustika Argo Lestari, dan PT. ADEI, terkait pembakaran hutan di Provinsi Riau.

Pemanggilan ini atas dasar hasil kunjungan spesifik mendapatkan informasi awal dari masyarakat dan Pemerintah bahwa dari 8 perusahaan yang terindikasi terhadap masalah proses kebakaran hutan yang terjadi di Riau pada bulan Juni beberapa waktu lalu.

“Komisi IV untuk melakukan klarifikasi atas informasi yang didapatkan dari penegak hukum maupun masyarakat,” kata Wakil Ketua Firman Subagyo (F-PG) saat memimpin RDPU dengan 6 dari 8 perusahaan yang diundang, di Gedung DPR RI, Senin (2/12).

Firman Subagyo, Komisi IV sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan dan regulasi, tentunya akan melihat agar ada perbaikan ke depan supaya kebakaran ini tidak terjadi terus menerus.

Menurutnya, Klarifikasi yang diberikan dari 8 perusahaan yang hadir 6, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam Rapat dengan aparat-aparat terkait termasuk aparat penegak hukum.

“Tanpa data dari perusahaan-perusahaan ini maka nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Firman.

Oleh karena itu, dijelaskan, kesimpulan akhir dengan pemerintah bahwa data yang diberikan perusahaan ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ketika nanti Pemerintah atau aparat

penegak hukum punya data yang berbeda dan bisa dipertanggungjawabkan, maka akan ada keputusan-keputusan lanjutan. yaitu sampai dengan pencabutan izin. “Ini yang kami rekomendasikan kalau sampai itu terjadi,” ungkap Firman Subagyo.

Firman juga menyampaikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, Komisi IV DPR RI akan mengundang pihak Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kepolisian RI, serta Dinas terkait dan BNPB, untuk mendalami masukan dan catatan RDPU pada sore hari ini.

Kedua, Komisi IV akan meminta kepada Pemerintah agar segera meninjau dan mencabut kembali Pencadangan Lahan yang diberikan kepada Perusahaan namun tidak dikeluarkan HGU nya, supaya dikembalikan kepada negara.

Firman Subagyo Patut diketahui, hal ini karena tadi yang disampaikan bahwa ternyata Pencadangan yang sekian ratus ribu hektar HGU hanya 25 ribu Ha, yang lainnya jika mana terjadi kebakaran dan kerusakan lainnya itu tidak menjadi tanggung jawab dari Pemegang HGU.

Hal ini maksud dan tujuannya adalah jelas siapa yang akan bertanggung jawab, tidak saling melempar seperti hari ini.

Ketiga, Komisi IV DPR RI akan mengundang dari 8 Perusahaan ini kembali, tentunya dalam rangka untuk menyampaikan tindak lanjut dari pertemuan yang akan kami adakan dengan aparat pemerintah termasuk aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, menurut Firman yang perlu Komisi IV sampaikan bahwa apakah ada faktor ketergesa-gesaan Pemerintah untuk menyampaikan 8 Perusahaan ini bahwa terindikasi terkait kebakaran hutan di Provinsi Riau.,

Memang faktanya, diungkapkan seperti itu informasi yang didapatkan Komisi IV, disampaikan bahwa dari 8 perusahaan itu yang tersangka memang sudah ada satu dan hari ini juga hadir. “Kami berterima kasih karena masukan ini positif untuk mendalami dengan pemerintah,” imbuhnya.

Selain itu, Komisi IV menyampaikan himbauan kepada pengelola perkebunan hendaknya dana CSR dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini karena, Komisi IV menyadari bahwa dana CSR bagi perusahaan-perusahaan besar, biasanya prosedur diajukan masyarakat mendapat persetujuan pemerintah setelah itu baru dapat dicairkan. Namun biasanya perusahaan ini malah lebih mengedepankan kepada LSM-LSM yang supaya tidak direcoki saja.

“Ini yang sering terjadi temuan dilapangan, jadi masyarakat hanya dikelabui saja, tidak mendapat manfaat dari CSR yang harusnya menjadi hak masyarakat,” kritik Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo dari Fraksi Partai Golkar, asal daerah pemilihan Jawa Tengah III. (as/sy)/foto:iwan armianas/parle.

Timwas Century DPR Akan Panggil Boediono

Tim Pengawas (Timwas) kasus Bank Century DPR dalam rapat internalnya yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung Rabu (4/12) memutuskan akan memanggil Boediono dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia. "Rapat tadi secara musyawarah mufakat disepakati akan memanggil Boediono pada Rabu (18/12) mendatang," ungkap Pramono kepada pers usai rapat.

Menurut Pimpinan Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini, keputusan itu diambil dengan berbagai pertimbangan yang ada terutama berkaitan dengan press release yang disampaikan seuai Wapres diperiksa KPK beberapa waktu lalu. Sedangkan soal prosedur pemanggilan kepada Boediono, adalah mekanisme yang biasa.

Inti dari usulan Timwas kata Pramono, adalah klarifikasi dari hal-hal yang

disampaikan Boediono dalam press release tersebut. Timwas, sambung Pramono, tidak ingin mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung di KPK, tetapi terkait dengan pernyataan Boediono dan semua anggota Timwas setuju untuk memanggil Boediono.

Dengan tegas Pramono mengatakan bahwa keputusan itu diambil secara musyawarah mufakat sehingga tidak ada berapa yang setuju dan berapa yang tidak setuju. "Jadi ya musyawarah mufakat," ujarnya menanggapi pertanyaan wartawan tentang sikap Fraksi Demokrat yang selama ini menolak pemanggilan Boediono. "Kalau musyawarah mufakat berarti kan pasti bulat," tegasnya lagi.

Ditanya pers dengan pemanggilan Boediono berarti ada pengamanan ekstra terhadap RI 2, Pimpinan DPR ini mengatakan, itu mekanisme biasa



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

dan Boediono dihadirkan dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur BI. Pemanggilannya, lanjut dia, dengan menghadirkan Boediono ke DPR dan surat pemanggilannya akan disampaikan segera.

Keputusan rapat Timwas lainnya menurut Pramono, Rapat Timwas pada Rabu siang ini yang semula dijadwalkan menghadirkan KPK, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Keuangan dan Mensesneg, akhirnya ditunda dan akan digelar pada Rabu pekan depan. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

Keanggotaan BPK Harus Kombinasi



Wakil Ketua Baleg DPR RI Sunardi Ayub.

Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dikombinasikan antara pegawai karir dan non karir. Itu adalah kombinasi ideal yang diharapkan bisa mengisi formasi anggota BPK ke depan. Dengan begitu, keputusan yang dihasilkan BPK lebih akuntabel dan komprehensif.

Demikian mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan BPK untuk membahas RUU BPK yang baru, Senin (2/12). Seperti diketahui UU No.15/2006 tentang BPK sudah tidak mampu lagi menjawab

kebutuhan dan perkembangan zaman. RUU ini merupakan usulan DPR dan drafnya sedang dibahas oleh Baleg.

Pada rapat kali ini, Baleg meminta masukan dari Wakil Ketua BPK Hasan Basri. Banyak persoalan internal BPK dikemukakan Hasan Basri. Sunardi Ayub (F-Hanura) Wakil Ketua Baleg mengatakan, masukan ini jadi bahan sangat berharga bagi Baleg dalam konsinyering dengan agenda membahas draf RUU BPK. RUU ini sudah dibahas Baleg kurang lebih 2 bulan dengan menghadirkan beberapa pakar di bidang keuangan dan hukum.

Hasan Basri dalam paparannya di hadapan anggota Baleg menjelaskan, dengan UU BPK yang ada sekarang, sulit bagi pegawai BPK untuk masuk ke jajaran keanggotaan BPK. Padahal, kata Hasan Basri, menjadi anggota BPK apalagi bisa masuk menjadi pimpinan BPK adalah karir tertinggi bagi pegawai BPK yang telah meniti karir dari dalam begitu lama. RUU yang baru nanti harus memberi ruang yang cukup untuk itu.

Menurut Hasan Basri, rekrutmen anggota BPK harus mencantumkan secara jelas usia minimal dan maksimal. Dengan begitu, keanggotaan BPK dilantik dan berakhir secara bersamaan. Sekarang anggota BPK ada yang pergi dan masuk secara bergantian, sehingga rekrutmennya pun

tidak teratur. Batas usia yang ada di UU BPK sekarang terlalu rendah, yaitu 35 tahun. Padahal, dulu di zaman ORBA, anggota BPK yang masuk banyak dari purnawirawan TNI/Polri, pensiunan BI, dan penegak hukum lainnya.

Pada bagian lain, RUU BPK ini nantinya juga harus mencantumkan kewajiban bagi penegak hukum untuk men-

gusut temuan tindak pidana korupsi (TPK) hasil audit BPK yang diserahkan ke penegak hukum. Selama ini, banyak audit investigasi BPK yang menemukan TPK dibiarkan begitu saja. Bahkan, ada TPK di tahun 2003 belum juga ditindaklanjuti penegak hukum hingga sekarang. (mh)/foto:iwan armanias/parle

RUU Panas Bumi : Hilangkan Terminologi Pertambangan Menjadi Pemanfaatan

Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Panas Bumi ingin memperbaiki yang ada UU No. 27 tahun 2003 Panas Bumi. Dimana disaat itu belum diatur mengenai definisi UU No.34 Tahun kehutanan tentang Hutan Lindung.

“Menghilangkan terminologi kalimat pertambangan menjadi kalimat pemanfaatan panas bumi jadi tidak berbenturan secara payung UU,” kata Wakil Ketua Pansus RUU tentang Panas Bumi Milton Pakpahan (F-PD), di Gedung DPR RI.

Milton menjelaskan Permasalahannya adalah kalau UU itu ada *klausula* yang mengatakan bahwa kegiatan panas bumi dan kegiatan penambangan eksplorasi. Dalam UU 34 tentang kehutanan, segala kegiatan penambangan di Hutan Lindung tidak diperbolehkan. “Ini menjadi suatu persoalan, dimana memang disatu sisi kadang-kadang ada masalah tudingan yang menjadi susah, kebijakannya jadi tidak ada payungnya,” ungkapnya.

Sekarang eranya sudah berubah, dari 29.000 mega watt potensi yang dimanfaatkan baru 1600 mega watt. Alasan mengapa ini lambat dimanfaatkan, menurut Milton karena semua potensi itu kebanyakan di area konservasi dan kawasan hutan lindung. Dan ini tidak jalan karena ada regulasi mengenai kepastian harga, infrastruktur yang ada banyak hubungan antara pemerintah daerah dan permintaan daerah keterlibatannya sudah sampai dimana.

Panas bumi dari sisi energi bersih, sangat bermanfaat dan terbaru, sedangkan secara harga juga tidak

memerlukan bahan bakar yang aktif seperti BBM. “Sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara kita untuk mengejar hasil replikasi kita kedepan dan menjadi energi yang ramah lingkungan,” katanya.



Wakil Ketua Pansus RUU Panas Bumi Milton Pakpahan.

Oleh karena, insiatif dari pemerintah datang kepada kami di komisi VII DPR untuk melakukan devisa dan kami menanggapi dengan baik, semangat serta setiap fraksi memiliki kesadaran tinggi karena kami sendiri berkelut dalam Penyediaan subsidi untuk bahan bakar minyak dalam pembangkit yang sangat-sangat besar. Dikatakan, kalau mau dimasukkan ke pemanfaatan seluruh aspek energi terbaru termasuk Geothermal ini akan mengurangi pemakaian dari BBM untuk pembangkit dan itu harganya akan sangat murah.

Selanjutnya, terkait pertumbuhan ekonomi, katanya kalau listrik tersedia di daerah-daerah yang memiliki potensi Geothermal akan bisa mendapatkan pemasokan daya tambahan yang luar biasa. Dan pada gilirannya industri, pe-

rumahan dan aspek kehidupan lainnya akan menjadi lebih baik. “Persediaan listrik menjamin pertumbuhan ekonomi,” tegas Milton.

Pansus juga akan melakukan evaluasi, kunjungan kerja ke beberapa lapangan yang ada untuk melihat mereka yang ada di lapangan itu ramah lingkungan (menjadi kelestarian lingkungan hidupnya), misalkan kami melihat dikawasan hutan lindung seluas 500.000 hektar dan kita hanya mengambil 10.000 hektar untuk fasilitas pengeborannya. Lalu kita harus melihat transmisinya kebawah (mengenai Hutan Lindung) dan akses itu harus dibuka. Dan disana melihat potensi Panas Bumi yang sudah mau masuk dan mau dijalankan namun belum bisa karena masalah perijinan birokrasi yang harus di bantu dipercepat.

Dalam setiap investasi baru, keterlibatan pemerintah daerah untuk mendapatkan *share* akan kita tekankan disana, dalam keterlibatan *share* atau kepedulian dan apresiasi akan tercipta rasa memiliki yang tinggi dimasyarakat. Sehingga ada rasa dihargai dengan melibatkan masyarakat disetiap potensi sehingga mereka menjaga serta tanggung jawab masyarakat, sehingga tercipta lapangan baru, kegiatan ekonomi yang baru dan kesejahteraan pasti meningkat yang pasti tidak merusak lingkungan.

“Kelebihan Indonesia ini adalah variasi dari energi primer,” tegas Wakil Ketua Pansus DPR RI RUU tentang Panas Bumi Milton Pakpahan dari Fraksi Partai Demokrat asal daerah pemilihan Papua. (as/ya)/Foto:iwan armanias/Parle.

Priyo Terima Wakil Ketua Parlemen Hongaria

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Ketua Parlemen Hongaria Janos Latorcai disela-sela pelaksanaan PC WTO (*Parliamentary Conference on the WTO*). Pertemuan dua pimpinan parlemen ini diharapkan dapat mempererat hubungan kedua negara.

“Ini saat baik untuk memulai babak yang lebih baik antara kedua negara. Jadi kita tidak hanya tersentral pada negara Eropa tertentu atau Amerika, Cina. Hongaria menghormati posisi strategis kita, mereka mau duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan Indonesia,” katanya usai pertemuan di Bali Convention Center, Nusa Dua, Senin (2/12/13).

Ia menyebut posisi Hongaria yang sekarang menjadi anggota Uni Eropa sangat strategis karena dapat digunakan Indonesia sebagai pintu masuk ke kawasan Eropa. Sementara bekas anggota Pakta Warsawa ini dapat menjadikan Indonesia sebagai pintu masuk perdagangan di Asia Tenggara.

“Dalam waktu dekat saya juga akan memenuhi undangan dari Ketua Parlemen Hongaria yang telah lebih dulu berkunjung ke DPR,” lanjut Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam ini.

Dalam kunjungan ke Hongaria itu Priyo dijadwalkan akan bertemu dengan Ketua Parlemen, Ketua Komisi Luar Ne-



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Ketua Parlemen Hongaria Janos Latorcai.

geri, Wakil Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Sosial dan sejumlah pejabat lain.

Sementara itu Wakil Ketua Parlemen Hongaria memaparkan sebagai mantan dosen ia mengusulkan untuk menjalin hubungan dengan negara di Timur. Indonesia menurutnya menarik karena berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi ketika sejumlah negara ditimpa krisis.

“Kita ingin belajar bagaimana cara mempertahankan pertumbuhan. Indonesia bagi kami juga sangat penting karena merupakan negara yang mempunyai banyak keyakinan agama dan tetap bisa hidup dalam damai,” ungkap Janos.

Ia juga menyebut kerja sama kedua negara terus ditingkatkan diantaranya bidang pendidikan dan budaya. Salah satu program yang ditawarkan adalah peluang beasiswa bagi 50 mahasiswa Indonesia untuk belajar di sejumlah perguruan tinggi di negara itu. (iky) foto:ry/parle

Pansus RUU Panas Bumi Serap Masukan Chevron Geothermal Garut

Ketua Pansus Panas Bumi Nazardin Kiemas mengatakan, kunjungan kerja spesifik pansus ke Chevron Geothermal di Garut, dalam rangka mencari masukan terkait RUU Panas Bumi. Pasalnya, Chevron sudah mulai mengeksplorasi panas bumi sejak tahun 1980-an jadi diharapkan mereka dapat memberikan masukan terhadap RUU itu.

“Pansus Ingin mengetahui aspek apa saja yang mereka hadapi dalam mengembangkan panas bumi,” ujarnya saat diwawancarai oleh Parlemen, di Garut, Rabu, (27/11).

Kendala di lapangan, lanjutnya, ternyata memang ada empat sumur di Chevron karena adanya UU Kehutanan jadi terhenti operasinya.



Tim Pansus RUU Panas Bumi kunjungi Chevron Geothermal Garut.

“Terdapat empat sumur disana, karena konservasi, padahal ini terdapat potensi lebih dari 34 MW tidak jalan,” ujarnya.



UU yang baru ini, lanjutnya, akan menggantikan UU no. 27 tahun 2003 artinya semua hambatan akan kita kurangi. “Yang sangat krusial ada terminologi panas bumi termasuk rezim pertambangan ini bukan menambang mineral karena panas itu tidak tampak dan terlihat,” terangnya.

Kedepan, nantinya daerah akan di-

berikan peluang untuk mengembangkan panas bumi. Saat ini eksplorasi Geothermal hampir 99 persen berada di hutan lindung, konservasi maupun hutan nasional.

“Sekarang ini tinggal keinginan politik pemerintah padahal banyak potensinya di Indonesia seperti angin, tenaga air maupun surya. “Sekarang masih jauh

bahkan panas bumi saja baru 1,5 persen yang baru digalakkan,” tandasnya.

DPR, tambahnya, mengharapkan panas bumi dapat mengurangi subsidi BBM kedepannya. “kita akui tahun 2019 nanti akan terjadi krisis listrik artinya pemerintah harus mempersiapkan kemungkinan krisis ini,” tambahnya. (si), foto : sugeng/parle/hr.

DPR Dukung Pembangunan Jalan Nasional Di Bintan



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Muhidin M. Said meninjau infrastruktur Kabupaten Bintan.

Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin Mohamad Said dari Fraksi Partai Golkar melakukan kunjungan spesifik dalam rangka peninjauan infrastruktur ke Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (27/11'13).

Kepada wartawan Muhidin mengatakan, tujuan kunjungan Komisi V DPR RI ke Bintan adalah untuk melihat kondisi Pelabuhan Internasional Tanjung Berikat dan pembangunan beberapa Jalan Nasional Bintan.

Menurut Muhidin, pembangunan jalan nasional di Bintan semua sudah hampir selesai. Oleh karena itu, lanjutnya, masyarakat Bintan harusnya sangat bersyukur karena memiliki Bupati yang dinilai luar biasa karena sukses menjalankan program pembangunan yang didanai pemerintah pusat. salah satunya pembangunan jalan nasional serta beberapa jembatan, tambah-

“Jalan-jalan strategis nasional dianggarkan melalui APBD. Mudah-mudahan kita bisa memperjuangkan terus supaya nantinya semua jalan strategis nasional yang bisa mendorong pertumbuhan pariwisata di daerah ini bisa dibantu Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum untuk memberikan dorongan tambahan anggaran,” ujar Muhidin.

Muhidin menambahkan, jalan nasional tidak usah dikhawatirkan lagi, karena tahun 2014 akan kita selesaikan semua. Oleh karena itu, lanjutnya, kita minta Bupati dan Gubernur untuk jalan-jalan strategis nasional diusulkan dalam rangka mendorong pariwisata.

Sementara itu Bupati Bintan Ansar Ahmad mengatakan, akan terus melakukan konsultasi kepada Komisi V DPR RI dan kementerian terkait untuk kelanjutan pembangunan jalan, pelabuhan, dan sarana prasarana lain-

nya untuk pengembangan dan kemajuan Kabupaten Bintan.

“Yang penting respon mereka (Komisi V DPR RI), Bintan ini menurut mereka merupakan ladang investasi ke depan. Mereka juga mengatakan pembangunan jalan-jalan ke desa akan di dukung. Mereka mengatakan tidak ada alasan untuk tidak mendukung program-program Bintan selanjutnya,” jelas Ansar.

Ansar menambahkan, rombongan Komisi V DPR RI sudah melihat secara langsung meskipun status jalan kita tidak berstatus jalan negara tetapi jalan kita adalah jalan penunjang kawasan pariwisata. “Saat ini Pemkab Bintan sudah menyiapkan *Detailed Engineering Design* (DED) untuk pembangunan jalur lintas barat Bintan, sehingga akses jalan semakin luas dan mudah,” kata Ansar.

Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan Infrastruktur ke Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 11 orang, dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin Mohamad Said disertai sejumlah anggota lintas fraksi, yakni Bahrum Daido dari Fraksi Partai Demokrat; Hetifah, Ibnu Munzir dan Bambang Sutrisnodari Fraksi Partai Golkar; Dadoes Soemarwanto dan Rendy A. Lamadjido dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Sigit Sosiantomo dan Chairul Anwar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; Hanna Gayatri dari Fraksi Partai Amanat Nasional; dan Muhammad Arwani Thomafi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. (iw) foto: iwan armanias/parle.

Pramono: Ideologi Pasar Menguat

Panggung politik nasional tampaknya sudah bergeser sangat jauh, dari politik ideologis ke politik pasar. Tren yang terjadi, semua orang yang ingin terjun ke dunia politik, mau tidak mau harus mengikuti ideologi pasar sesuai tuntutan masyarakat masa kini.

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo, menegaskan hal tersebut saat membedah buku karyanya sendiri dengan judul “Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi. Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen” di Press Room DPR, Selasa (3/12). Hadir pula sebagai pembicara yang membincang buku ini, mantan Ketua MK Mahfud MD, pakar komunikasi politik Effendi Gazali, dan pengamat politik J. Kristiadi.

Kekhawatiran Pramono atas fenomena politik mutakhir di Indonesia



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

sangat jelas terekam dalam buku ini. Menurutnya, para politisi yang ingin melenggang ke Senayan, hampir tak bisa mengelak dari politik kemas, yaitu sentuhan tangan para pekerja *Public Relation* (PR) untuk merubah tampilan fisik para caleg menjadi lebih

ciamik. Tapi, sesungguhnya kosong dari sisi ideologis.

Para politisi yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif cenderung individualis ketimbang berjuang bersama mengemban misi ideologi partai. Pergi “merias diri” ke PR atau konsultan politik sudah menjadi tren para caleg. Akibatnya, biaya politik jadi sangat mahal.

Sementara itu, mantan Ketua MK Mahfud MD, mengatakan, buku yang ditulis Pramono betul-betul sangat akademis dan punya tanggung jawab ilmiah. Pramono tampak sangat cermat dan sungguh-sungguh menelaah politik kekinian di Tanah Air. Senada dengan Pramono, Mahfud juga mengatakan, saat ini banyak caleg pragmatis dan tidak lagi memikirkan latar ideologisnya. (mh)/foto:odjie/parle/iw.

Karding Gantikan Anna di Kursi Wakil Ketua Baleg



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berjabat tangan dengan Pimpinan Baleg yang baru Abdul Kadir Karding.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso secara resmi mengukuhkan Abdul Kadir Karding untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR. Karding, begitu ia sering disapa, menggantikan Wakil Ketua Baleg sebelumnya, yakni Anna Mu’awanah.

“Fraksi PKB menyampaikan usulan perubahan untuk Wakil Ketua Baleg, karena Anna Mu’awanah dipromosikan di tempat lain. Maka ditugaskanlah tokoh lama, yaitu Abdul Kadir Karding, untuk menjabat posisi sebagai Wakil Ketua Baleg,” kata Priyo saat memimpin acara pengukuhan ini di ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Rabu (4/12).

Priyo menambahkan, untuk susunan Pimpinan Baleg DPR yang lain masih tetap sama. Ketua Baleg tetap Ignatius Mulyono (F-Demokrat). Termasuk juga Wakil Ketuayang lain, tetap Sunardi Ayub (F-Hanura) dan Dimiyati Natakusumah (F-PPP).

Priyo berpesan kepada segenap jajaran Baleg untuk segera mempercepat penyelesaian hal-hal yang menjadi tugas Baleg. Pasalnya, masa jabatan Anggota Dewan untuk periode 2009-2014 segera berakhir.

“Baleg harus mempercepat waktu dan langkah untuk segera menyelesaikan banyak hal, karena waktu kita tersisa tinggal sedikit lagi. Saya mohon nanti Pimpinan Baleg tak segan-segan membantu anggota DPR. Karena posisi sinkronisasi semua Undang-undang ada di Baleg. Nanti diberitahu ke seluruh Anggota Dewan, kalau waktu kita memang sangat cepat,” pesan Priyo.

Politisi Golkar ini memperkirakan, masa persidangan mendatang akan lebih sulit, karena memasuki Tahun Politik, dimana terjadi Pilpres dan Pemilu Legislatif. Sehingga, ia meminta kepada seluruh jajaran Baleg menumpahkan konsentrasi untuk menyelesaikan berbagai RUU yang sekarang sedang dalam proses tersebut.

“Dengan demikian, apakah usulan dari F-PKB yang meminta Ana Mu’awanah diganti Karding bisa disetujui?” tanya Priyo, dan mendapat persetujuan dari seluruh Pimpinan

dan Anggota Baleg yang hadir. Palu pimpinan pun diberikan dari Priyo kepada Ketua Baleg Ignatius Mulyono.

Ditemui usai acara, Karding menyatakan bahwa tugas baru yang diberikan kepadanya merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Ini amanah yang harus saya emban. Masih ada 65 RUU yang akan diprioritaskan untuk di Undang-undangan, seperti RUU Migas, RUU Tembakau, RUU Pengendalian Minuman Beralkohol, RUU Haji dan RUU Perbukuan Nasional,” ucap politisi yang juga menjabat Anggota Komisi VI ini. (sf)
Foto:odjie/parle.

Ego Sektoral, Salah Satu Kendala Pemulangan TKI di Kepri

Anggota Komisi IX DPR dari Partai Hanura yang juga Wakil Ketua Timwas TKI DPR RI, Djamal Azis menegaskan tidak beresnya masalah pemulangan Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah, lebih dikarenakan adanya ego sektoral masing-masing departemen. Padahal dari anggaran yang nilainya ratusan miliar bisa diformulasikan untuk pembinaan para tenaga kerja Indonesia.

Disela-sela pertemuan bersama Pemprov Kepri di kantor Gubernur Tanjung Pinang Djamal Azis menegaskan, bahwa penanganan masalah TKI tidak akan pernah selesai, apalagi saat ini Kementerian Sosial tidak berani untuk menyerahkan anggaran pemulangannya ke masing-masing daerah, sehingga sifatnya masih sentralisasi. Padahal itu bisa ditangani oleh daerah yang ditunjuk seperti Tanjung Pinang, Selasa (03/12).

Selama dua hari (Selasa dan Rabu, 03 sd 04 Des.) Timwas TKI dipimpin Ketuaanya Adang Daradjatun mengunjungi Provinsi Kepri memantau secara langsung masalah pemulangan TKI di Tenggareng, Tanjung Pinang.

Lebih lanjut Djamal Azis menanggapi pemulangan TKI lewat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian dikirim ke Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta, padahal ada sebagian TKI yang daerahnya lebih dekat dari Kepri, ia menilai hal itu terjadi karena masih adanya ego sektoral. Karena yang punya kepentingan dalam hal itu adalah Departemen Sosial.

“Padahal pemulangan tersebut bisa dilakukan tanpa harus jauh-jauh melewati Tanjung Priok atau Jakarta. Itu lebih efisien dan ekonomis, dan tentunya tidak akan terjadi dengan masalah anggaran. Jelas hal itu terjadi karena ego sektoral dan tidak memahami kondisi lapangan”, jelas Djamal.

Setelah melihat letak Tanjung Pinang yang menjadi tempat transitnya pemulangan TKI, ia menyarankan sebaiknya di Pemda Kepri ini dibangun sebuah Balai latihan Kerja (BLK) khusus TKI. Hal itu perlu dilakukan, sehingga para TKI yang dipulangkan bisa diberdayakan, karenamemiliki kompetensi dan bisa dipekerjakan, jika ada lapangan pekerjaan yang tersedia.

“Kita tawarkan dalam mengatasi masalah TKI ini di Tanjung Pinang bisa dibangun BLK untuk TKI. Dari pada anggaran untuk pemulangan kedaerah-daerah yang nilainya ratusan miliar, sebaiknya dilakukan seperti itu. Sambil



Timwas TKI DPR RI dipimpin Adang Daradjatun memantau pemulangan TKI di Tenggareng, Tanjungpinang.

menunggu dia bisa bekerja disini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Timwas TKI DPR Adang Daradjatun yang memimpin kunjungan tersebut mengatakan, masukan-masukan dalam pertemuan ini, akan dibahas lebih lanjut. Karena di Kepri khususnya Tanjung Pinang merupakan daerah yang cukup berat untuk menangani pemulangan TKI yang bermasalah.

Setelah mendengarkan masukan-masukan dari daerah ini, akan dikoordinasikan dengan lembaga-lembaga yang menangani masalah TKI. “Jangan sampai kebijakan yang diambil salah. Begitu juga mengenai masalah pemulangan TKI kedaerah-daerah akan menjadi kajian Timwas TKI,” jelas Adang.

Menjawab pertanyaan mengenai banyaknya TKI Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti Malaysia dan Arab Saudi, Djamal mengatakan mereka nekat bekerja keluar negeri bukan tanpa alasan ataupun tanpa sebab. Pasalnya ia tahu persis, maksud dan tujuan TKI untuk bekerja di luar negeri, karena ingin adanya perubahan status. Bukan semata mata sebatas alasan untuk mencari makan, tetapi lebih dari itu ingin mempunyai rumah, motor dan bisa menyekolahkan anak.

“Tentunya apabila lapangan pekerjaan di dalam negeri memadai para TKI tidak perlu bekerja keluar negeri. Saya memahami benar hal itu, karena sebelum menjadi anggota DPR, saya kerja menjadi tekong para TKI,” ungkap politisi asal Jatim ini. (hr), foto : eka hindra/parle/hr.



Ketua DPR RI didampingi H.M. Muas Ketua PMI Bidang Relawan menerima delegasi Palang Merah Indonesia terkait tuntutan RUU Kepalangmerahan, Selasa (03/12). Foto: iwan armanias/parle.



Timwas TKI DPR RI meninjau Tempat Penampungan TKI Wanita dan Pria di Tenggaraeng Kepri dipimpin Ketua Timwas Adang Daradjatun, Selasa (03/12) Foto: hindra/parle.



Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Bandara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat dipimpin Laurens Bahang Dama, Rabu (27/11) Foto: agung/parle.